

Problem Politik Media Terhadap Korupsi

Mukhijab

Jurnalis SKH *Pikiran Rakyat* Bandung dan Dosen Manajemen Sumber Daya Manusia Media di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.

Abstract

This article describes the role of the media to support the eradication of corruption in Indonesia, which is displayed in the form of editorial policy of the media in constructing social reality of corruption cases. Two patterns of reconstruction of social reality as a basis editorial policy, which consists of the reconstruction as rewriting and reconstruction as the actualization of the cultural ideology of journalism by working with certain strategies such as news or reconstructing interpretative facts accompanied by a media crew assessment. Its meaning is, the product should be aligned reconstruction of social reality and is able to transform the values of an anti-corruption into public space. The problem is when the national media or local media that makes governments and institutions that have economic and political power as a strategic partner, the media tend to be politically conservative attitudes or rewriting only in constructing a case of corruption by reason of maintaining objectivity the role of the media. That attitude can be used as an indication that the media in a crisis situation in favor of eradication of corruption

Keywords: *Media Politic, corruption, reconstruction of reality*

Abstrak

Artikel ini menggambarkan peran media untuk mendukung program pemberantasan korupsi di Indonesia, yang ditampilkan dalam bentuk kebijakan editorial dari media dalam mengkonstruksi realitas sosial kasus korupsi. Dua pola rekonstruksi realitas sosial sebagai basis kebijakan politik redaksi, yang terdiri dari rekonstruksi sebagai penulisan ulang dan rekonstruksi sebagai aktualisasi ideologi jurnalistik melalui kerja kultural dengan strategi tertentu seperti *interpretative news* atau merekonstruksi fakta disertai dengan penilaian awak media. Maknanya adalah, produk rekonstruksi realitas sosial harus berpihak dan mampu mentransformasi nilai-nilai anti korupsi ke ruang publik. Masalahnya ketika media nasional atau media lokal yang menjadikan pemerintah dan institusi-institusi yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik sebagai mitra strategis, sikap politik media cenderung konservatif atau sekedar menulis ulang dalam mengkonstruksi kasus korupsi dengan alasan memelihara objektivitas peran media. Sikap seperti itu dapat digunakan sebagai indikasi bahwa media dalam situasi krisis dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: *Politik Media, korupsi, rekonstruksi realitas*

Pendahuluan

Laporan korupsi dalam media menjadi tema seksi. Wakil Ketua Transparansi Internasional Serbia Frank Vogl bercanda, jika seseorang memiliki informasi tentang skandal korupsi yang melibatkan orang penting, jual saja kepada media pasti mau

membayarnya. Vogl bermaksud menekankan bahwa program pemberantasan korupsi harus bersinergi dengan media karena institusi ini sangat esensial perannya dalam program pemberantasan korupsi, terutama media yang bebas dan independen dalam mengonstruksi skandal